

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT  
TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Kabupaten Malang)**

Risky Riyanda Rama Putra  
Siti Ragil Handayani  
Topowijono  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Email : 105030400111009@mail.ub.ac.id

***Abstract***

*The amount of Taxpayer is increasing year by year, unfortunately, it's not balanced with the Tax Compliance in order to fulfil Taxpayer's obligation. The purpose of this research to analyze the influence of Administrative Sanction, Taxation Socialization and Taxpayer Awareness toward Tax Compliance for Reporting Individual Tax Return.*

*Based on the results regression analyze, the tax payer compliance as dependent variable and Administrative Sanctions, Socialization Taxation and Taxpayer Awareness as independent variables, obtained F-value in the amount of 35,199 and its significant level is 0,00 (less than 0,05). So it means that independent variable has a significant influence upon dependent variable. The magnitude of the partial test results are known t count variable X1 to variable Y is 2,708 this means that t count > t table (2,708>1,984 ). The magnitude of the t count variable X2 to variable Y is 2,993 this means that t count > t table ( 2,993>1,984 ). Then the magnitude of the t count variable X3 to variable Y is 2,272 this means that t count > t table ( 2,272>1,984 ). On the result of calculation, Adjusted R Square is 0,509. It means tax payer compliance be influenced only 50,9% by dependent variable.*

**Keywords :** *Administrative Sanction, Taxation Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Compliance*

**Abstrak**

Jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi meningkatnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dan sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas, memiliki F hitung sebesar 35,199 dan tingkat signifikan 0,00 (lebih kecil dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sementara itu dari hasil uji parsial diketahui besarnya t hitung variabel X1 terhadap Y adalah 2,708 artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,708 > 1,984), besarnya t hitung variabel X2 terhadap variabel Y adalah 2,993 artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,993 > 1,984), kemudian besarnya t hitung variabel X3 terhadap Y adalah 2,272 artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,272>1,984). Berdasarkan hasil perhitungan, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,509, artinya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi sebesar 50,9 % oleh variabel bebas.

**Kata Kunci:** Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efisien dan efektif yang berguna untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan restrukturisasi organisasi pada tahun 2012 yang memungkinkan wajib pajak untuk datang cukup ketempat Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat wajib pajak tersebut terdaftar dan dapat berhubungan langsung dengan AR (*Account Representative*) dimana AR (*Account Representative*) ini disediakan Kantor Pelayanan Pajak untuk dapat membantu wajib pajak apabila kesulitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Surat Pemberitahuan dapat disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak secara langsung ke Kantor Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar dengan batas waktu yang telah ditentukan atau dikirim melalui *dropbox* yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak ataupun melalui *e-filling*. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya (Akhadiyah, 2009:3). Oleh karena itu pemberian sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang baik, diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan SPT wajib pajak orang pribadi, dengan banyaknya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan dan melaporkan SPT maka jumlah penerimaan Pajak di KPP Pratama Singosari akan semakin meningkat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari adalah instansi pemerintah yang mengurus jumlah penerimaan negara di bidang pajak yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan. Rasio Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2008 sebesar 68.12%, tahun 2009 sebesar 65.82%, tahun 2010 sebesar 72.62%, tahun 2011 sebesar 66.94% dan pada tahun 2012 sebesar 62.23% (Seksi PDI KPP Pratama Singosari, 2013). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan masih sangat kecil, dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar disetiap tahunnya, akan tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.

Tujuan yang diharapkan adalah mengetahui pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan

penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengetahui faktor yang memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum Perpajakan

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut beberapa ahli ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak, yaitu diantaranya:

Menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2) :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

### 2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu (Waluyo, 2011:6):

a) Fungsi Anggaran atau Penerimaan (budgetair):

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah

dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

b) Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

c) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

d) Fungsi Redistribusi

Pendapatan penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 3. Wajib Pajak

Ada beberapa definisi umum mengenai pengertian dari Wajib Pajak menurut pasal 1 Undang-undang No 28 tahun 2007:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 4. SPT (Surat Pemberitahuan)

Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

a) Definisi SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

c) Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

d) Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak dalam suatu tahun pajak

### 5. Sanksi Administrasi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2009).

### 6. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi oleh para ilmuwan diartikan sebagai cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat, serta bagaimana mereka mempelajari peran-peran yang diharapkan akan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa (Sahid, 2011: 198). Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
- b) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
- c) Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
- d) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
- e) Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat.
- f) Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## 7. Kesadaran Wajib Pajak

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Balai Pustaka (2002) kesadaran berasal dari kata dasar sadar yang berarti tahu, mengerti. Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Ritonga, 2011).

## 8. Kepatuhan Perpajakan

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu (2003) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *explanatory research*. Menurut Singarimbun (2006:5) *explanatory research* atau penelitian penjelasan adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Jadi hubungan kausal antara variabel-variabel yang ada dibuktikan melalui pengujian hipotesis.

### 2. Variabel

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a) Variabel Bebas, Variabel Bebas (*independen*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu Konsep Sanksi Administrasi ( $X_1$ ), Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ) dan Konsep Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ).
- b) Variabel terikat (*dependen*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ).

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012:215) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Jumlah wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 59.513 dan sampel yang digunakan menggunakan teknik *sampling random* sebanyak 100 sampel wajib pajak orang pribadi.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian metode dalam pengumpulan data dapat melalui wawancara, kuesioner dan observasi (Sugiyono, 2012:137). Dalam penelitian ini terdapat dua metode pengumpulan data:

- a) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.
- b) Studi Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang menjadi objek penelitian dan catatan-catatan instansi lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang dapat digunakan sebagai data tambahan dalam suatu penelitian.

## 5. Teknik Analisis

- a) Uji Validitas dan Reliabilitas.

### 1) Uji Validitas

Uji validitas adalah bukti bahwa instrument, teknik atau proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang dimaksudkan, Sekaran (2006:248). Menurut Sugiyono (2012:126), suatu item dikatakan valid apabila koefisien korelasi  $> 0,3$  dan signifikan lebih kecil dari  $0,05$  ( $\alpha = 0,05$ ). Pada penelitian ini untuk mengetahui kesahihan dari kuesioner menggunakan rumus *Pearson Product Method*.

Pada penelitian ini semua item dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$

### 2) Uji Realibilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan (keandalan) alat pengumpul data (instrument) yang digunakan, suatu instrument dikatakan realibilitas apabila memiliki koefisien realibilitas sebesar  $> 0,6$  Siregar (2010:175). Pada penelitian ini mencari realibilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Semua variabel pada penelitian ini sudah reliabel, karena variabel sanksi administrasi memiliki koefisien korelasi sebesar  $0,745$ , variabel sosialisasi perpajakan sebesar  $0,720$ , variabel kesadaran wajib pajak sebesar  $0,739$  dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar  $0,741$

- b) Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Normalitas

Dalam uji normalitas peneliti menggunakan Sig. dibagian kolom Kolmogrov-Smirnov, karena data yang diuji lebih besar dari  $50$  atau respondennya lebih dari  $50$ . Angka signifikan uji Kolmogrov-Smirnov Sig.  $> 0,05$  menunjukkan data berdistribusi normal.

### 2) Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari  $0,05$  ( $5\%$ ) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homokedastisitas.

### 3) Uji Multikolonieritas

Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari  $5$ , maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolonieritas dengan variabel bebas lainnya, dan sebaliknya bila VIF lebih kecil dari  $5$  maka tidak terjadi multikolonieritas atau non multikolonieritas.

### 4) Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik idealnya bebas dari autokorelasi. Model pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (Priyatno, 2008:47).

- c) Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda ialah analisis pengaruh setiap variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Analisis ini dilakukan jika jumlah variabel bebasnya minimal dua. Sesuai dengan banyaknya variabel yang diteliti, sebagaimana dinyatakan oleh Usman dan Akbar (2008:241).

Model analisis regresi linier berganda tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_n X_n$$

Dimana :

Y = Variabel Terikat

$X_1, X_2, \dots, X_n$  = Variabel Bebas

a = Konstanta  
 $b_1, b_2, \dots, b_n$  = Koefisien Regresi

## 6. Pengujian Hipotesis

### a) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R < 1$ ), dimana semakin tinggi nilai R suatu regresi atau semakin mendekati 1, maka akan semakin tepat suatu garis regresi dan untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

### b) Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1)  $H_0$  : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat (Y).

2)  $H_a$  : Ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat (Y).

Apabila diperoleh probabilitas F hitung  $p < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, dan sebaliknya apabila probabilitas F hitung  $p > 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

### c) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independennya ( $X_1, X_2, X_3$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y), (Priyatno, 2008:83). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1)  $H_0$  : secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat (Y).

2)  $H_a$  : secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3$ ) terhadap variabel terikat (Y).

Apabila  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan sebaliknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Deskriptif

#### a) Variabel Sanksi Administrasi

Berdasarkan deskripsi variabel sanksi administrasi ( $X_1$ ) diperoleh rerata sebesar 3,842. Hal ini menunjukkan

bahwa rata-rata jawaban responden adalah setuju.

#### b) Variabel Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan deskripsi variabel sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) diperoleh rerata sebesar 3,978. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah setuju.

#### c) Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan deskripsi variabel kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) diperoleh rerata sebesar 4,1975. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah setuju.

#### d) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh rerata sebesar 4,176. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah setuju.

## 2. Analisis Regresi Berganda

Tabel 1. Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,121	1,376		5,173	,000
	X1	,194	,072	,262	2,708	,008
	X2	,298	,100	,327	2,993	,004
	X3	,244	,107	,233	2,272	,025

Sumber: data primer, diolah tahun 2014

Berdasarkan pada tabel 5, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 7,121 + 0,194 X_1 + 0,298 X_2 + 0,244 X_3$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a) Konstanta sebesar 7,121 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel  $X_1, X_2$ , dan  $X_3$  maka nilai variabel Y adalah 7,121.

b) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,194 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_1$  (Sanksi Administrasi). Jadi, apabila sanksi administrasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,194 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi dianggap konstan atau tetap.

c) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,298 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_2$  (Sosialisasi Perpajakan). Jadi, apabila sosialisasi perpajakan mengalami peningkatan 1

satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,298 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi dianggap konstan atau tetap.

- d) Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,244 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X3 (Kesadaran Wajib Pajak). Jadi, apabila kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,298 satuan dengan asumsi variabel bebas lain dari model regresi dianggap konstan atau tetap.

### 3. Pengujian Hipotesis

- a) Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Tabel 2. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,724	,524	,509	1,563	1,958

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan analisis pada tabel 6 diperoleh hasil adjusted  $R^2$  sebesar 0,509. Hal ini berarti bahwa 50,9% variabel kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang Pribadi akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu sanksi administrasi (X1), sosialisasi perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3). Sedangkan, sisanya 49,1% variabel kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

- b) Uji F

Tabel 3. Uji F

ANOVA <sup>b</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	258,006	3	86,002	35,199	,000 <sup>a</sup>
Residual	234,554	96	2,443		
Total	492,560	99			

Sumber: *data primer, diolah tahun 2014*

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 35,199 dan F tabel ( $\alpha = 0,05$  ; df regresi = 3 ; df residual = 96) adalah sebesar 2,70. Karena F hitung 35,199 > F tabel 2,70 atau F hitung  $p = 0,000 < 0,05$  maka model analisis

regresi adalah signifikan, hal ini berarti  $H_a$  diterima.

- c) Uji t

Berdasarkan tabel 5 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) t test antara X1 (Sanksi Administrasi) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,708 dan t tabel ( $\alpha = 0,05$  ; df residual = 96) sebesar 1,984. Karena t hitung > t tabel. Maka pengaruh X1 (Sanksi Administrasi) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi administrasi.
- 2) t test antara X2 (Sosialisasi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,993 dan t tabel ( $\alpha = 0,05$  ; df residual = 96) sebesar 1,984. Karena t hitung > t tabel. Maka pengaruh X2 (Sosialisasi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan. Pada penelitian ini juga dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan merupakan variabel bebas yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien beta sebesar 0.327 dan t hitung sebesar 2,993.
- 3) t test antara X3 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,272 dan t tabel ( $\alpha = 0,05$  ; df residual = 96) sebesar 1,984. Karena t hitung > t tabel. Maka pengaruh X3 (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah signifikan. Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak.

#### 4. Pembahasan

- a) Sanksi administrasi terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel sanksi administrasi ini memiliki 5 item, yaitu perlu adanya sanksi administrasi untuk mencegah keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $X_{1.1}$ ), Sanksi Administrasi efektif untuk mencegah keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $X_{1.2}$ ), Penerapan Sanksi administrasi selama ini sudah baik ( $X_{1.3}$ ), Penerapan Sanksi Administrasi sudah fair atau tidak pandang bulu ( $X_{1.4}$ ) dan Pemberian Sanksi administrasi selama ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku ( $X_{1.5}$ ).

Analisis regresi dengan variabel Sanksi Administrasi menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dari hasil regresi diketahui kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,194 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_{1.1}$  (Sanksi Administrasi). Sedangkan berdasarkan uji t diketahui bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} 2,708 > t_{tabel} 1,984$  atau  $sig. = 0,008 < 0,05$  maka dapat disimpulkan pengaruh  $X_{1.1}$  (Sanksi Administrasi) terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah positif dan signifikan.

- b) Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel sosialisasi perpajakan ini memiliki 5 item, yaitu wajib pajak sering mendapatkan penyuluhan perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari ( $X_{2.1}$ ). Kegiatan seminar dan pelatihan pajak yang dilakukan Kantor pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai arti penting pajak ( $X_{2.2}$ ). Media sosialisasi seperti iklan, brosur, banner, pamflet dan sebagainya yang selama ini diterapkan oleh Kantor Pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. ( $X_{2.3}$ ). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan Kantor Pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak untuk melakukan kepatuhan di bidang perpajakan ( $X_{2.4}$ ) dan Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak menjadi mengerti tata cara pengisian

SPT dan menghitung kewajiban perpajakan ( $X_{2.5}$ ).

Analisis regresi dengan variabel Sosialisasi Perpajakan menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dari hasil regresi diketahui kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,298 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_{2.1}$  (Sosialisasi Perpajakan). Sedangkan berdasarkan uji t diketahui bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} 2,993 > t_{tabel} 1,984$  atau  $sig. = 0,004 < 0,05$  maka dapat disimpulkan pengaruh  $X_{2.1}$  (Sosialisasi Perpajakan) terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah positif dan signifikan.

- c) Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak ini memiliki 4 item, yaitu wajib pajak sadar pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan dan dapat dipaksakan ( $X_{3.1}$ ). Wajib pajak sadar akan manfaat dan arti pentingnya pajak terhadap pembangunan nasional ( $X_{3.2}$ ). Wajib Pajak sadar bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban perpajakan dan harus saya patuhi ( $X_{3.3}$ ). Wajib Pajak selama ini menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa adanya rasa paksaan ( $X_{3.4}$ ).

Hasil dari analisis regresi dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak ini menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dari hasil regresi diketahui kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,244 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_{3.1}$  (Kesadaran Wajib Pajak). Sedangkan berdasarkan uji t diketahui bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $t_{hitung} 2,272 > t_{tabel} 1,984$  atau  $sig. = 0,025 < 0,05$  maka dapat disimpulkan pengaruh  $X_{3.1}$  (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah positif dan signifikan.

- d) Faktor Dominan dalam Meningkatkan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji t test atau secara parsial diketahui bahwa hasil dari 3 variabel bebas yang diteliti yaitu sanksi administrasi ( $X_1$ ), sosialisasi perpajakan



(X2) dan kesadaran wajib pajak (X3), diketahui hasil masing-masing dari pengujian t test yaitu didapat hasil koefisien standar beta dan t hitung untuk sanksi administrasi (X1) 0.262 dan 2.708. Sosialisasi perpajakan (X2) menunjukkan hasil koefisien standar beta sebesar 0.327 dan t hitung sebesar 2,993 sedangkan untuk Kesadaran wajib pajak (X3) menunjukkan hasil koefisien standar beta sebesar 0.233 dan t hitung sebesar 2,272. Berdasarkan hasil dari t test tersebut dapat diketahui variabel yang dominan yaitu sosialisasi perpajakan (X2) karena memiliki nilai koefisien dan standar beta yang paling besar diantara variabel lainnya yaitu nilai koefisien sebesar 0.327 dan t hitung sebesar 2,993.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a) Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tegas diberlakukannya sanksi administrasi, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari cenderung meningkat.
- b) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan penyampaian SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi intensitas sosialisasi dibidang perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari cenderung meningkat, dimana sosialisasi perpajakan ini merupakan variabel paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak, maka tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak di KPP Pratama Singosari cenderung meningkat

### 2. Saran

- a) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari diharapkan dapat terus meningkatkan intensitas dalam memberikan sosialisasi perpajakan kepada seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memahami mengenai arti penting pajak dan diharapkan dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak mengenai pajak, maka akan diimbangi pula dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
- b) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari sebenarnya sudah menyediakan berbagai brosur, pamflet ataupun banner untuk menyosialisasikan peraturan pajak, akan tetapi rasa ingin tahu wajib pajak tentang peraturan terbaru masih rendah. Hal ini terlihat dari sikap acuh tak acuh terhadap media-media sosialisasi yang telah disediakan, oleh karena itu lebih baik KPP Pratama Singosari mensosialisasikan peraturan terbaru tersebut melalui media internet, karena internet merupakan media sederhana, mudah diakses dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi dalam pembuatan dan pengelolaannya.
- c) Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, diharapkan hasil penelitian ini mampu mendorong peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak, seperti contoh variabel pelayanan, pengawasan dan faktor lain yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiyah, Laili. 2009. *"Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi"* (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan), Skripsi (S1), Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Konsentrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002). Departemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3. Balai Pustaka, Jakarta. Gramedia.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Granit : Jakarta.
- Priyatno, Duwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Mediakom : Yogyakarta.
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 2013. *Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di KPP Singosari (periode tahun 2010-2012)*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.
- Ritonga, Pandapotan 2011, “*Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur*”, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.
- Santoso, Singgih. 2001. *Riset pemasaran :Konsep dan aplikasi dengan SPSS* . ELex Media Komputindo : jakarta.
- Sekaran, Uma.2006. *Research Methods For Bussines*. Salemba empat : Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian effendi, 2006. *Metode Penelitian Survei (editor)*. LP3ES : Jakarta.
- Siregar, Syofian. 2010. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.